

BAB I

PENDAHULUAN

Millenium Development Goal's (MDG's) adalah serangkaian program yang memiliki 8 tujuan, yaitu : Menghapuskan kemiskinan, Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal, Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, Mengurangi tingkat kematian anak, Meningkatkan kesehatan ibu, Mengurangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, Menjamin keberlanjutan lingkungan, Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. MDG's telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Millenium pada September 2000. MDG's adalah komitmen dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan social dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan social.

MDG's mendorong Pemerintah, Lembaga Donor dan Organisasi Masyarakat Sipil dimanapun untuk mengorientasikan kembali kerja-kerja mereka untuk mencapai target-target pembangunan yang spesifik. Hubungan Pemerintah dan MDG's selama ini mengalami kemajuan yang banyak mempengaruhi kebijakan Negara dan beberapa keputusan Presiden. Dengan diberlakukannya program MDG's di Indonesia khususnya di bidang kemiskinan pada tahun 2006. Sempat terjadi kemajuan yang ditunjukkan dengan keberhasilan Pemerintah sebagai fasilitator dan pemberdaya

MDG's yang dibawa oleh UNDP. Kemajuan ini diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan sampai semua tujuan MDG's tercapai.

A. Alasan Pemilihan Judul

,Topik ini menarik untuk dikaji karena berbagai kebijakan yang bernilai positif pada tahun 2006 khususnya program MDG's dalam mengentaskan kemiskinan akan memungkinkan memacu pencapaian MDG's pada tahun 2015. Topik ini menjadi pilihan karena ;

1. Secara teknis data-data yang dibutuhkan banyak tersedia dan mudah didapat
2. Bermanfaat dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.

Topik ini juga sebagai parameter keberhasilan pelaksanaan program MDG's dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah organisasi dunia yang bergerak di bidang pembangunan, dalam aktivitasnya, UNDP telah menghasilkan Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report/HDR).¹ Hal ini merupakan upaya untuk mengoreksi pendapat bahwa tingkat kemajuan suatu bangsa tidak bisa hanya dilihat dari

¹ "Millenium Development Goal's" terdapat di [Http // Hdr.Undp. org / en / Hal 16](http://Hdr.Undp.org/en/Hal) akses 4 Maret 2008

pertumbuhan ekonomi. Laporan pembangunan manusia memuat tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni kehidupan yang sehat, memiliki kemampuan untuk bereproduksi secara aman dan sehat, serta berpendidikan dan berpengetahuan.

Dimensi pertama dapat dijabarkan yaitu mengenai kehidupan yang sehat. Hal ini dapat diartikan bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh berkelanjutan hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya. Hal ini sangat berpengaruh juga pada kesehatan SDM itu sendiri sebagai pilar dasar pembangunan manusia . Dimensi kedua dapat dijabarkan mengenai kemampuan untuk bereproduksi secara aman dan sehat yaitu dengan mempelajari pengalaman menekan angka kemiskinan di banyak negara, pengurangan kesenjangan dan memperbaiki kualitas reproduksi sehingga mampu menciptakan SDM yang berkualitas yang diharapkan sebagai dasar pembangunan manusia. Dimensi ketiga dapat dijabarkan mengenai tingginya pendidikan dan pengetahuan membuktikan dapat mengangkat potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan apabila kebodohan meningkat cenderung mengabaikan dasar pembangunan manusia akibatnya saat ekonomi meluas pada gilirannya menimbulkan masalah sosial dan politik.² Tiga indikator inilah yang dijabarkan secara rinci ke dalam indikator-indikator yang dari tahun ke tahun semakin ketat.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi

² Kompas, *Laporan Pembangunan Manusia 2003*. Jum'at 11 Juli 2003 Hal 46

Deklarasi Milenium. Deklarasi itu berdasarkan pendekatan yang inklusif, dan berpijak pada perhatian bagi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dalam konteks inilah negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDG)*.

Tahun 2003, UNDP mengangkat tema “*Millennium Development Goal*” (MDGs), suatu tema yang mengandung delapan tujuan di antaranya (1) Menghapuskan kemiskinan (2) Mencapai Pendidikan Dasar secara Universal (3) Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (4) mengurangi tingkat kematian anak (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (7) Menjamin keberkelanjutan lingkungan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan..³ Masing- masing merupakan komitmen khusus untuk membendung laju penyebaran kemiskinan dan penyakit yang harus dicapai pada tahun 2015, didukung suatu rencana aksi beserta 18 tujuan yang terukur untuk mengurangi angka kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, kerusakan lingkungan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Tujuan- tujuan tersebut menuntut tanggung jawab yang jelas dari negara maju, menetapkan aturan perdagangan yang lebih adil, keringanan pembayaran utang pada negara berkembang, alih teknologi, dan lain- lain.

Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) adalah serangkaian tujuan yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Milenium pada September 2000. Tujuan Pembangunan Milenium adalah komitmen

³ “*Millennium Development Goals Program*” Terdapat di <http://undp.org> akses 22 Maret 2008

dari komunitas internasional terhadap pengembangan visi mengenai pembangunan; yang secara kuat mempromosikan pembangunan manusia sebagai kunci untuk mencapai pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan global. Tujuan Pembangunan Millenium mendorong pemerintah, lembaga donor dan organisasi masyarakat sipil di manapun untuk mengorientasikan kembali kerja-kerja mereka untuk mencapai target-target pembangunan yang spesifik.⁴

Seperti tercantum dalam Deklarasi Milenium tahun 2000, MDGs merupakan *benchmark* dari kemajuan terhadap visi pembangunan, perdamaian, dan hak asasi manusia yang dipandu oleh nilai- nilai fundamental tertentu yang sangat penting bagi hubungan internasional pada abad ke- 21. Nilai- nilai itu mencakup kebebasan, kesetaraan, solidaritas, toleransi, penghargaan pada alam, dan berbagi tanggung jawab. MDGs diharapkan menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyengsarakan manusia. Gambaran dunia sampai saat ini masih saja suram meskipun terjadi kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan manusia. Seperti kita ketahui Program- program MDG's yang akan dilaksanakan :

1. Menghapuskan kemiskinan absolut dan kelaparan sampai separuh dari jumlah yang ada saat ini, Lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia atau satu dari lima penghuni Bumi, hidup dengan penghasilan di bawah 1 dollar per hari. Setiap

⁴ "MDG's Program and Poverty" terdapat di [Http : www.un.org / apps / News /Story asp ? News Id = 25205 & Cr = Indonesia akses 14 Maret 2008](http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=25205&Cr=Indonesia)

hari 779 juta penduduk di Negara kurang berkembang atau Negara miskin, yang jumlahnya sekitar 18 % dari penduduk dunia, menderita kelaparan. Separuh dari jumlah ini berada di Asia Selatan dan Afrika Subsahara.

2. Mencapai pendidikan dasar yang universal bagi semua tingkat pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Saat ini satu dari lima anak di dunia tidak menyelesaikan pendidikan dasar atau setiap tahun lebih dari 10 juta anak atau 30.000 anak per hari meninggal karena penyakit-penyakit yang sesungguhnya bisa dihindari kalau uang yang digunakan untuk membeli peralatan perang dikurangi 10 persen saja. Jumlah anak yang meninggal karena diare dalam dasawarsa terakhir ini lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang tewas dalam berbagai konflik bersenjata yang terjadi setelah Perang Dunia II.
3. Mendorong kesetaraan gender di semua tingkat pendidikan dan pemberdayaan perempuan.
4. Menurunkan angka kematian bayi dan anak sampai dua pertiganya dari jumlah saat ini.
5. Meningkatkan kesehatan ibu dan mengurangi sampai tiga perempat jumlah angka kematian ibu hamil dan melahirkan. Setiap tahun sekitar 500.000 perempuan atau satu orang per menit meninggal saat hamil dan ketika melahirkan. Di negara-negara subsahara situasinya lebih mengenaskan lagi karena seorang perempuan mempunyai kemungkinan 100 kali lipat untuk meninggal saat hamil dan melahirkan dibandingkan para perempuan di negara-negara anggota Organisasi Kerja Ekonomi dan Pembangunan .Satu

dari lima penduduk dunia tidak menikmati fasilitas air bersih dan 2,4 miliar penduduk atau satu dari hampir tiga orang di dunia tidak dapat menikmati sanitasi yang memadai.

6. Memberantas HIV / AIDS dan penyakit- penyakit infeksi penyebab utama kematian. Di banyak negara berkembang, wabah HIV/ AIDS terus menyebar, mengakibatkan lebih dari 14 juta anak kehilangan salah satu atau kedua orangtuanya pada tahun 2001. Jumlah anak yang menjadi yatim piatu karena AIDS diperkirakan mencapai dua kali lipat dari jumlah itu pada tahun 2010.
7. Menjamin keberlanjutan lingkungan dengan memasukkan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai kebijakan dan program negara. Menghentikan kerusakan sumber daya alam dan mengurangi sampai separuh jumlah orang yang tak punya akses pada sanitasi dan air bersih serta meningkatkan taraf hidup dari sedikitnya 100 juta orang di permukiman kumuh.
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan dengan mengembangkan system perdagangan terbuka dan system keuangan berbasis hukum, teratur, dan tidak diskriminatif, termasuk melaksanakan tata pembangunan untuk mengurangi kemiskinan baik di tingkat nasional dengan pengurangan utang dan bantuan finansial secara lebih tulus, akses negara berkembang pada obat-

obat esensial dengan harga yang terjangkau serta pemanfaatan teknologi baru, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.⁵

Semua itu diharapkan akan terealisasi tahun 2015. Tiap negara memiliki sasarannya sendiri dengan tolok ukur jelas yang akan dicapai pada tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu negara turut yang turut aktif mencapai tujuan MDGs hingga saat ini masih banyak memiliki masalah serius. Kemiskinan, kesehatan tidak mendapatkan cukup perhatian, angka kematian ibu melahirkan tetap tinggi, degradasi lingkungan kian parah, urbanisasi tidak begitu berhasil karena lingkungan perkotaan tidak layak huni, padat dan tercemar, kemacetan, beban infrastruktur, jumlah penduduk tinggi, wilayah yang luas dan terpencar dalam pulau-pulau. Pertumbuhannya sangat tidak merata. Banyak pemerintah daerah belum berfungsi baik, tak punya kapasitas dan sumber daya. Banyak yang harus dilakukan supaya proses Pencapaian MDG's berjalan baik.

Berbicara masalah kemiskinan, Indonesia belum lepas dari belenggu yang satu ini. Apakah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan pada suatu bangsa? Ada yang meyakini secara sederhana bahwa faktor internal seperti masalah nasib dan kondisi fisik sebagai penyebab kemiskinan. Pendapat lain adalah, bahwa faktor eksternal seperti ketergantungan terhadap pihak lain serta berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berimbang sebagai akar masalahnya.

Masalah kemiskinan bisa dikatakan sebagai masalah yang tiada henti mewarnai kehidupan bangsa Indonesia di masa kemerdekaan, bahkan pada masa

⁵ "Program MDG's" terdapat di [Http // Deplu.go / id / Lmbr](http://Deplu.go/id/Lmbr) 3 akses 14 Maret 2008.

penjajahan. Kesenambungan masalah kemiskinan dari masa ke masa ditandai oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada periode pemerintahan yang satu ke periode pemerintahan yang lain, dari presiden satu ke presiden yang lain. Salah satu periode pemerintahan yang paling panjang dalam sejarah Indonesia- adalah pemerintaha Orde Baru yang menjalankan strategi pembangunan berdasarkan trilogy: stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Pada periode pemerintah Orde Baru inilah dinamika penanggulangan kemiskinan sangat beragam.

Kebijakan pemerintah menjadi faktor utama di dalam mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk miskin di wilayahnya. Beberapa kebijakan pemerintah yang menyebabkan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang terpuruk dan menjadi miskin belakangan ini bisa diinventarisasi sebagai berikut :

(a) Strategi pembangunan ekonomi yang mendorong industrialisasi menggantikan produk-produk impor (industrialisasi subsitusi impor) pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik, jika tidak mau dikatakan kurang berhasil, (b) kebijakan penyesuaian/kenaikan harga bahan bakar minyak pada gilirannya menyebabkan adanya peningkatan harga-harga umum (inflasi), dan (c) Berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat distortif, saling tumpang tindih, dan tidak konsisten, hanya melahirkan dan melestarikan peningkatan ekonomi biaya tinggi (high cost economic) di berbagai bidang sektor.⁶

⁶ “ Kemiskinan dan Pembangunan” Http // www. id. Wikipedia..org ./ wiki / orde baru diakses pada tanggal 6 April 2008

Pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan semenjak dasawarsa 1970-an. Sekurangnya ada tiga corak usaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, yaitu pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan berbasis hak. Pendekatan pemenuhan dasar adalah upaya-upaya untuk menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk bisa hidup layak, antara lain diwujudkan berupa pemenuhan pangan, kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi, pendidikan, serta tempat tinggal yang layak.

Aspek yang dianggap penting dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat atau pendekatan pembangunan berbasis komunitas (community-based development approach), adalah adanya usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok-kelompok masyarakat yang merupakan penduduk miskin. Upaya-upaya yang ditempuh di dalam pendekatan ini melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, distribusi aset ekonomi dan modal usaha/kerja penguatan kelembagaan masyarakat.

Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas bidang kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan usaha Kecil Menengah Prasetyono Wijoyo, mengutip data Badan Pusat Statistik tahun 2006, mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini adalah 39,05 juta atau 17,75 persen dari jumlah penduduk miskin di dunia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terdiri

dari rumah tangga miskin 19,1 juta dan dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu 2,8 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin, dan 6,9 juga dekat dengan miskin.⁷

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana, dan pendampingan. Berbagai upaya tersebut telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40,1%) pada tahun 1986 menjadi 22,5 juta (11,3%) pada tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi sejak Juli 1997 membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu melemahnya kegiatan ekonomi, memburuknya pelayanan kesehatan dan pendidikan, memburuknya kondisi prasarana dan sarana umum, menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Krisis ekonomi juga mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Menurut perhitungan BPS, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) pada tahun 1998. Sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian yang diikuti oleh terkendalinya harga barang dan jasa, dan meningkatnya pendapatan masyarakat, jumlah penduduk miskin menurun secara bertahap menjadi 36,1 juta jiwa (16,6%) pada 2006. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, 11,5 juta jiwa (12,6%) berada di perkotaan dan 24,6 juta jiwa (19,5%) berada di perdesaan. Penurunan ini

⁷Sarwono Kusumaatmadja, *Politik dan Kemiskinan*, Koekoesan Juni 2007 Hal 22

merupakan dampak dari hasil transfer pendapatan berbagai program pembangunan termasuk jaring pengaman sosial yang dirancang khusus untuk mengatasi dampak negatif krisis.

Disadari atau tidak, kemiskinan yang cenderung menjadi potret suram negeri ini adalah akibat kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sebelum adanya MDG's belum membuahkan hasil dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya program baru yaitu MDG's diharapkan Pemerintah dapat membuat kemajuan dalam mengentaskan kemiskinan. Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk bekerjasama dengan UNDP dalam menjalankan program- program yang dibuat MDG's.⁸

Strategi Nasional pemerintah dalam upaya pencapaian program MDGs dengan tujuan melaksanakan program yang dibuat oleh UNDP, yang disampaikan pada saat *High Level Plenary Meeting* (HLPM) bulan September 2005 di New York. Terkait dengan pemantauan dan pencapaian program MDGs di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Buku Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Milenium Pada bulan Pebruari 2004.

Buku tersebut dimaksudkan untuk menelaah dan mengukur kemajuan; mengenali tantangan; dan mengkaji program dan kebijakan untuk mencapai tujuan MDGs. Tujuan penerbitannya adalah untuk mendapatkan kesamaan pandang tentang posisi Indonesia dalam kaitan dengan sasaran MDGs, dan untuk menetapkan target

⁸[Http// Google. Pembangunan Millenium / Com / Hal 21](http://Google.PembangunanMillenium/Com/Hal21)

yang harus diagendakan. Sehubungan dengan Tujuan ke-8, Indonesia akan terus mengintensifkan upaya-upaya penguatan *governance*, pemberantasan korupsi dan perbaikan iklim investasi dan terus mengupayakan pembentukan kemitraan antara negara maju dan negara berkembang dalam pencapaian MDGs melalui pendekatan bilateral, regional maupun multilateral.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam rangka pencapaian MDGs, menuntut sistem perdagangan keuangan dan bantuan internasional. Hal ini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan penekanan khusus dalam pencapaian Tujuan MDGs, Indonesia berharap bahwa negara-negara maju, organisasi donor dan organisasi internasional lainnya dapat melakukan langkah lebih lanjut dalam pencapaian MDG's khususnya di bidang kemiskinan pada tahun 2006 dan kerjasama global untuk membantu pencapaian MDGs di tingkat global.

Indonesia mendukung prinsip *common but differentiated responsibility* dalam mencapai sasaran pembangunan dan upaya penghapusan kemiskinan. Negara-negara maju harus memenuhi porsi tanggung jawabnya secara konkrit dan dengan kerangka waktu (*timeframe*) yang jelas. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas bantuan pembangunan, sistem perdagangan internasional yang adil dan berorientasi pembangunan, serta pengurangan beban hutang negara-negara

berkembang secara berarti.⁹

Pemerintah juga akan meningkatkan representasi negara berkembang yang lebih proporsional dalam proses pengambilan keputusan masyarakat internasional untuk secara bersama merevitalisasi peran PBB di bidang keuangan, moneter, pengentasan kemiskinan dan perdagangan internasional, yang diarahkan guna memfasilitasi mobilisasi dana bagi pembangunan negara-negara berkembang dan peningkatan koherensi dan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan antara PBB dengan lembaga-lembaga *Bretton Woods* dan WTO, serta LSM yang *memonitoring* sasaran MDGs.

Masyarakat internasional harus meningkatkan upayanya untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian hutang negara-negara berkembang berpenghasilan menengah melalui suatu kerangka yang komprehensif. Indonesia mendukung perubahan pendekatan dalam definisi *debt sustainability*, yaitu penggunaan dana untuk mencapai target MDGs menjadi prioritas sebelum pembayaran hutang kepada lembaga-lembaga donor multilateral dan bilateral.¹⁰

Namun kebijakan tersebut tidak mengurangi dana bantuan pembangunan yang dialokasikan kepada negara berkembang lainnya. Dalam kaitan ini, Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah pembayaran hutang secara konsisten sesuai dengan jadwal dan pengaturan yang ditentukan, dalam konteks

⁹Hessel Nogi S. *Penataan Birokrasi Publik Memasuki Era Millenium*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia Oktober 2006 Hal 131

¹⁰Kompas, *Menentukan Pencapaian MDG's*. 14 Juli 2005 Hal 42

pelaksanaan mekanisme dan strategi pengelolaan *debt sustainability*.

Salah satu kemitraan dan kerjasama yang diusulkan Indonesia adalah *debt for MDGs swap* untuk dapat diterima secara luas. Konsep ini akan lebih efektif dan sehat dalam mencari jalan keluar bagi permasalahan hutang luar negeri negara berkembang. Indonesia misalnya dapat memanfaatkan dana yang semula dialokasikan untuk membayar hutang, untuk dipakai membiayai program-program yang berkaitan dengan pencapaian MDGs.

Menyikapi masalah kemiskinan di Indonesia perlu formulasi yang efektif mengingat parahnya kondisi penduduk Indonesia akibat kemiskinan. Terlebih, abad ke- 21 ini menghadapkan dunia pada berbagai ancaman. Tidak saja berupa potensi perang dan konflik, tetapi juga ancaman akibat kemiskinan, penyakit menular yang mematikan, dan degradasi lingkungan. Hal itu, menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, menjadi penting karena dua pertiga dari total penduduk termiskin dunia (1,2 miliar jiwa) tinggal di Asia Pasifik. Kenyataan ini sudah semestinya disikapi dengan serius oleh pemerintah Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan.

Sampai sejauh ini Pemerintah Indonesia berperan dalam menjalankan program IPKM (Indeks Pembangunan Kemiskinan Manusia) pada tahun 2006 yang lalu. Upaya Pengentasan pengentasan kemiskinan benar- benar menjadi perhatian utama bagi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan MDG di bidang

kemiskinan. Anggaran yang dikucurkan untuk menangani kemiskinan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 anggarannya 18 Triliun kemudian pada 2005 meningkat menjadi 23 Triliun, anggaran 2006 sebesar 42 Triliun.¹¹

Dengan adanya anggaran yang besar dan program jangka pendek yang dibentuk oleh MDG di bidang kemiskinan maka pada tahun 2006 Pemerintah Indonesia dan MDG di bidang kemiskinan berperan dalam melaksanakan Program MDG itu di Indonesia dan ini menjadikan program MDG di bidang kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia berhasil dibanding program Pemerintah itu sendiri. Pemerintah Indonesia menyusun laporan komprehensif tentang *achievement* MDG di bidang kemiskinan pada tahun 2006 sampai terealisasi pada tahun 2015 mendatang. Indonesia baru membuat tiga kali laporan pencapaian MDG di bidang kemiskinan, berbasis data- data 2003 sampai 2006.¹²

Seperti kita ketahui komitmen politik di tingkat nasional masing-masing negara bertekad untuk mencapai MDGs tergolong tinggi. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih belum memuaskan.maka tidak salah apa yang dilakukan PBB menggelar kampanye global untuk mendorong percepatan tercapainya tujuan pembangunan milenium akan tetapi kalau kita mau jujur sebenarnya kuncinya bukan pada kampanye global, tetapi bagaimana kampanye di tingkat lokal bisa berjalan efektif. Di Indonesia perkembangan di tingkat pelaksanaan hampir semua obyek tujuan MDG masih dalam kondisi memprihatinkan.

¹¹.Http// www . IPKM. Croeso. Typepad. Com . Html hal 56 diakses pada tanggal 17 Februari 2008

¹² jeremy Seabrok, *Kemiskinan Global*. Resist Book. September 2006 Hal 69

Seiring dengan pesatnya pencapaian program MDG di bidang kemiskinan pada tahun 2006 terjadi pula penurunan kemiskinan mencapai 25 %. Jumlah ini diperkirakan akan terus ditingkatkan sampai MDG's terlaksana di Indonesia pada tahun 2015. Apabila mengkaji profil keberhasilan Negara dalam menjalankan MDG di bidang kemiskinan pada tahun 2006, sebenarnya bukan masalah kesejahteraan melainkan mengandung berbagai isian.:

1. Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan (*Vulnerability*).
2. Masalah tertutupnya akses ke berbagai peluang sumber daya produktif, termasuk modal, sumber daya alam produktif, modal pengembangan, bahkan kesempatan kerja.
3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial dalam menghadapi kekuasaan dalam hal-hal yang menyangkut pembuatan keputusan yang berhubungan dengan dirinya.¹³

Dengan adanya 3 pendekatan yang dilakukan Pemerintah bersama UNDP (United Nation Development Program) di bidang kemiskinan. Pemerintah sebagai pemberdaya program MDG untuk rakyat di bidang kemiskinan mengalami kemajuan pada tahun 2006 walaupun masih di bawah target yang ditetapkan oleh UNDP. Di Indonesia salah satu indikator kemiskinan yang dipergunakan untuk menentukan garis batas kemiskinan adalah pendapatan per kapita. Perhitungan ini menghasilkan

¹³Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia Emas*. Penerbit PT Elex Media Komputindo 2005
Hal 77

masuk akan jumlah penduduk miskin absolut dan miskin relatif, dua jenis kemiskinan yang paling generik

Kemiskinan absolut berarti mereka yang benar- benar miskin dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini kebanyakan ada di negara- negara berkembang, khususnya terjadi karena keterbelakangan negara tersebut dan menjadi agenda program Pemerintah Negara dalam mengentaskan kemiskinan sebagai tolok ukur keberhasilan mengentaskan kemiskinan di Negeranya. Sedangkan kemiskinan relatif menunjuk pada penduduk yang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun berada dalam strata masyarakat yang paling bawah dibandingkan masyarakat sekelilingnya; yaitu mereka yang sudah hidup di atas garis miskin,tetapi mereka masih berada dalam kondisi rentan untuk jatuh miskin (di bawah garis kemiskinan) karena berada dalam posisi strata terbawah. Kelompok ini sering pula disebut sebagai kelompok yang subsistem dan Kemiskinan relatif inilah yang menjadi agenda Pemerintah Indonesia atau Negara bersama MDG di bidang kemiskinan dalam mengentaskan kemiskinan melalui program- program yang akan dijalaninya.¹⁴

Pemerintah ikut berperan bersama MDG di bidang kemiskinan dengan membangun kemitraan. Program- Program MDG's khususnya di bidang kemiskinan menjadi satu unsur penting yang harus diadopsi sebagaimana dimandatkan dalam deklarasi serta prinsip- prinsip Rio de Janeiro, Agenda 21, Deklarasi Johannesburg, serta Deklarasi Millenium. Pemerintah, bisnis, nirlaba dan terutama masyarakat sipil

¹⁴Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia Emas*. Penerbit PT Elex Media Komputindo 2005 Hal 77

secara proaktif perlu melibatkan diri dalam keseluruhan proses implementasi MDGs sebagai salah satu wujud komitmen konkret.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia sangat tidak merata. Ketidakmerataan dalam sistem distribusi tidak hanya bersifat teknis, namun terutama menyangkut sistem pembagian kekayaan yang tidak adil, serta pertumbuhan dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat miskin dan terpinggirkan. Maka kenyataan ini membawa kita pada stigma yang berkembang di masyarakat yakni sebenarnya yang terjadi di Indonesia bukan kemiskinan yang sesungguhnya akan tetapi pemiskinan. Pemiskinan erat kaitannya dengan Kemiskinan Global yang disebabkan bukan soal kekurangan sumber daya, melainkan suatu akibat digenggamnya kendali ekonomi oleh negara- negara kaya.¹⁵ Hal ini di karenakan kemiskinan bukanlah produk yang datang tiba- tiba, tapi merupakan dari penindasan yang dilakukan oleh pemiskinan. Para ahli mengatakan setidaknya terdapat kekuatan besar yang berdasarkan kuasa wewenang, kuasa moral dan kuasa modal yang datang dari luar dan menjerumuskannya ke jurang kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan seperti yang digambarkan diatas tidak hanya menyangkut dana, akan tetapi masalah data, persiapan program, langkah-langkah di lapangan serta yang paling mendasar seperti yang telah disinggung diatas yakni pemerintahan yang bersih dan baik serta berkeinginan kuat menyangkut pemberantasan kemiskinan ini.

¹⁵Jeremy Seabrook, *Kemiskinan Global*. Resist Book September 2006

Komitmen politik pencapaian MDGs di Indonesia khususnya di bidang kemiskinan pada akhirnya dihadapkan pada dataran implementasi di lapangan. Aliansi kemitraan atau persekutuan dari organisasi publik, bisnis, dan nirlaba berada dalam satu jaringan yang bergerak secara efisien dan efektif menuju tujuan bersama yang menentukan keunggulan sebuah negara. Berkaca pada kenyataan itu, sudah saatnya pemerintah menjadikan masalah kemiskinan ini sebagai prioritas dalam pelaksanaan pemerintahannya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, kita dapat mengemukakan perumusan masalah yakni Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyukseskan keberhasilan program MDGs dalam kurun waktu 2004- 2006 terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang dipakai untuk mendapatkan kesamaan persepsi guna menelaah kasus peluang MDG dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2004 - 2006 yakni:

Teori Peranan

Dalam penelitian kali ini penulis juga menggunakan teori peranan untuk menjelaskan peran aktif yang semestinya dijalankan pemerintah Indonesia dalam

mencapai tujuan MDG di bidang kemiskinan di tahun 2006. Menurut Jack C. Plano, Teori Peranan (role) merupakan: *Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dari suatu kelompok social.*¹⁶

Sementara itu, peranan politik adalah perilaku yang diharapkan pemegang posisi seperti pembuat undang-undang, pemimpin partai, pemilih- pemilih, revolusioner, berkenaan dengan pengambilan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang sah bagi masyarakat. Harapan masyarakat yang membatasi peranan tertentu sangat sering mengeneralisir sehingga pemegang peranan dapat memilih dengan leluasa bentuk perilaku tertentu. Penentuan peranan dipengaruhi oleh persepsi pemegang peranan terhadap harapan orang lain atas peranannya, tafsirannya sendiri atas peranan tersebut, kepekaan terhadap tuntutan tumbuhnya penentu peran yang khas karena situasi dan kemampuan serta kecakapannya dalam menanggapi masalah. Konsekuensi dari peran yang dipegang aktor itu menimbulkan harapan atau dugaan. Sehingga pada akhirnya harapan atau dugaan inilah yang nantinya membentuk suatu peran. Sehingga peranan aktor akan sangat tergantung dari harapan atau dugaan tadi. Pada dasarnya harapan dapat berasal dari dua sumber yakni dari dalam sang aktor dan dari luar sang aktor.¹⁷

Tidak itu saja harapan serigkali muncul dari cara sang aktor menafsirkan peranan yang di pegangnya, yakni apa yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukannya dan menyangkut pula apa yang tidak bisa dilakukannya. Harapan dari

¹⁶Jack. C. Plano. Robert E Riggs, Helenan S. Robin, *Kamus Analisa Politik*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1994 Hal 220

¹⁷Alan C Isaak, *Scoope And Metods Of Political Science*. (Homewood, Ilionis : Porsey Press 1981)

sang aktor ini akan menjadi gagasan bagi sang aktor. Sebagian besar gagasan ini akan mencerminkan sikap, ideologi, dan kepribadian yang dikembangkan sebelum memegang perannya. Ada kalanya harapan dari luar dapat mempengaruhi gagasan sang aktor, tetapi akan sulit bagi pihak lain untuk mengetahui apakah gagasan sang aktor tersebut telah mendapat pengaruh dan pertimbangan yang muncul dari luar atau belum sama sekali.

Dalam konsep peranan kita akan menemukan hubungan antar peranan. Dengan asumsi seperti itu maka akan tercipta suatu hubungan yang kompleks, yang mana satu peranan akan berakaitan dengan peranan yang lainnya.. Pada akhirnya akan melahirkan konflik antar peranan yakni pertentangan antar peranan aktor-aktor yang berkepentingan tidak terkecuali dalam masalah MDG di bidang kemiskinan ini. Dalam penelitian ini, pemerintah Indonesia dianggap sebagai pemegang posisi yang dapat menentukan peraturan-peraturan, pengambilan keputusan dan pengarahannya kebijakan bagi tercapainya tujuan MDG di bidang kemiskinan pada tahun 2006.

Konsep manajemen

Proses manajemen adalah interaksi dan saling keterkaitan antara beberapa fungsi manajemen yang digunakan. Menurut Harold Koontz dan Cryril O'Donnell mengatakan bahwa dalam melakukan tugas manajerial seseorang tidak terlepas dari kerjasama dengan orang lain dan dilakukan dengan proses *step by step of doing something*.

Model manajemen yang merupakan kegiatan utama manajemen yaitu :

1. Perencanaan : Merupakan pemilihan sasaran organisasi atau penentuan Organisasi yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk Kerja sama dan pembagian tugas.
2. Pengorganisasian : Sebagai wadah atau alat yang dapat digunakan untuk merealisasikan sasaran atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.
3. Kepemimpinan : Dilakukan oleh manajer untuk dapat mengarahkan, mengkoordinasikan dan mempengaruhi kepada bawahan untuk bekerja dengan sadar dan tanpa paksaan untuk mencapai tujuan.
4. Pengendalian : Upaya untuk melancarkan usaha perbaikan dan pengembangan yang menekankan pada penggunaan rencana yang strategis (rencana panjang dengan cakupan yang luas).

Sesuai dengan konsep manajemen ini, Pemerintah Indonesia membuat Program-Program MDG's agar sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan program yaitu pada tahun 2015. Program-program untuk mensukseskan MDGs sengaja dibuat Pemerintah Indonesia dengan melihat keadaan langsung yang terjadi di masyarakat, program-program pengentasan kemiskinan seperti SLT, BOS maupun Kukesra yang dibuat Pemerintah mempunyai satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pasca kenaikan harga BBM. Pemerintah juga berusaha agar

penyaluran bantuan kepada masyarakat kurang mampu ini tidak salah sasaran. Untuk meminimalisir salah sasaran ini, Pemerintah melalui laporan Badan Pusat Statistik dan kerjasama dari aparat tingkat provinsi sampai aparat desa melakukan pendataan tentang jumlah akurat masyarakat yang berhak untuk menerima subsidi langsung Pemerintah pusat.

E. Hipotesis

Dari permasalahan yang ada dan disertai juga dengan kerangka berpikir yang ada maka dapat kemukakan hipotesa sebagai berikut:

- Dalam rangka ikut berperan aktif dalam menyelesaikan Program MDGs terutama dalam pengentasan kemiskinan, Pemerintah Indonesia pada tahun 2004 - 2006 telah mencanangkan beberapa kebijakan guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia, antara lain :
 - 1. Program Takesra Dan Program Kukesra Tahun 2004.**
 - 2. Pembentukan Dewan Penanggulangan Kemiskinan dengan program JPS (Jaring Pengaman Sosial) Tahun 2004.**
 - 3. Program SLT (Subsidi Langsung Tunai) Tahun 2005**
 - 4. Program IPKM (Indeks Pembangunan Kemiskinan Manusia) dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2006.**

F. Prosedur Analisis

Setelah diawali dengan bab pendahuluan, bab kedua akan memuat tentang Kemiskinan di Indonesia dan langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Indonesia Sebelum Adanya Program MDG antara 1998- 2002.

Selanjutnya pada bab ketiga, Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Sejarah Singkat MDG's di Indonesia. Selain itu pada Bab ini akan menguraikan sejarah MDG's di Indonesia khususnya di bidang kemiskinan pada tahun 2006.

Bab ke empat akan melakukan analisis dengan menggunakan teori peran mengenai langkah apa saja yang seharusnya di lakukan pemerintah guna mencapai tujuan MDG di bidang kemiskinan pada tahun 2006. Argumen utama yang dimunculkan adalah restrukturisasi kebijakan-kebijakan Pemerintah akan merupakan cara yang paling memungkinkan bagi terwujudnya MDGs di bidang kemiskinan pada tahun 2006.

Selanjutnya untuk membatasi analisis, jangkauan penelitian ini dibatasi jangka waktunya yaitu tahun 2000-2006. Ini didasari pertimbangan- pertimbangan, pertama, bersamaan dengan di tanda tangannya MDGs di New York bulan September 2000 tergambar pula peningkatan jumlah penduduk miskin yang membawa implikasi kepada MDG di bidang pengentasan kemiskinan pada tahun 2006 yang harus terwujud di Indonesia. Kedua, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih akut akibat krisis yang melanda asia tahun 1997-1998.

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, dengan berdasarkan kerangka teori kemudian ditarik suatu hipotesis yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literature- literature, makalah- makalah ilmiah, jurnal- jurnal ilmiah, majalah- majalah, surat kabar, dokumen- dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak, laporan- laporan resmi MDG's dan sumber- sumber lain yang relevan.

G. Garis Besar Isi Penulisan

Setelah diawali dengan pendahuluan yang memuat berbagai ketentuan metodologis, pada bab kedua akan diuraikan tentang kemiskinan di Indonesia dan langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah Indonesia Sebelum Adanya Program MDG antara 1998- 2002.

Bab ketiga akan menguraikan mengenai Sejarah Singkat MDG's di Indonesia. Selain itu pada Bab ini akan menguraikan sejarah MDG's di Indonesia khususnya di bidang kemiskinan pada tahun 2006.

Peran mengenai langkah-langkah penting yang mesti dilakukan pemerintah guna mencapai MDG di bidang kemiskinan akan dibahas pada Bab empat. Uraian akan ditutup dengan Bab kesimpulan, dan saran, yang berusaha menegaskan hasil penelitian, yaitu bahwa Hipotesis yang dikemukakan bisa

dibuktikan sesuai dengan kaidah- kaidah pembuktian dan analisis selain itu akan diberikan juga sedikit saran yang bersifat membangun.